

THE INFIDELITY AUTHORITY AND ENTREPRENEURS TOWARDS FORFEITURE OF PUBLIC RIGHTS

PERSELINGKUHAN PENGUASA DAN PENGUSAHA TERHADAP PERAMPASAN HAK-HAK PUBLIK

Masriadi

Email: patu.masriadi@yahoo.co.id

ABSTRACT

In spite of the public policy cannot be dodged by various non-public interest, but the contain of its public importance must be bigger than the non-public interest, due to the public policy is always moving between political and economy interest, the so called political economy in field of public policy. The policy of Karebosi Field Revitalization of Makassar City is most inclined to business policy-oriented rather than public policy, as this policy exceptionally beneficial business sector (private) than society. On the contrary, this policy describe "an affair" between state (the authority) and capitalist (entrepreneur) which directly and indirectly rob public rights away. This policy revealed how strong the capitalist grip to influence public policy undertaken by the decision makers in government institution (state), whereas in fact the core duty of state (government) is provide public service for entire citizens including maintaining its public rights in any shape. The policy of Karebosi Field Revitalization of Makassar City is proven as giving nothing advantage for government and society of Makassar City, indeed this policy carried out the public rights that should be protected by state. Then the policy supposed to be evaluated immediately, because of policy period will exceed the decision maker period.

Keywords: *Public policy, public interest, authority-capitalist affair, robbery of public rights, and capitalist grip.*

ABSTRAK

Meskipun kebijakan publik tidak bisa dielakkan oleh berbagai kepentingan non-publik, tapi kepentingan publik harus lebih utama dari kepentingan non-publik, karena kebijakan publik selalu bergerak antara kepentingan politik dan ekonomi, yang disebut politik ekonomi di bidang kebijakan publik. Kebijakan Lapangan Karebosi Revitalisasi Kota Makassar yang paling cenderung untuk kebijakan berorientasi bisnis daripada kebijakan publik, karena kebijakan ini sektor bisnis yang sangat menguntungkan (pribadi) dari masyarakat. Sebaliknya, kebijakan ini menjelaskan "affair" antara negara (otoritas) dan kapitalis (pengusaha) yang secara langsung dan tidak langsung merampok hak-hak masyarakat pergi. Kebijakan ini mengungkapkan seberapa kuat cengkeraman kapitalis untuk mempengaruhi kebijakan publik yang dilakukan oleh para pengambil keputusan di lembaga pemerintah (negara), padahal tugas inti negara (pemerintah) adalah memberikan pelayanan publik bagi seluruh warga negara termasuk menjaga hak publik dalam bentuk apapun. Kebijakan Lapangan Karebosi Revitalisasi Kota Makassar terbukti sebagai memberikan keuntungan apa-apa bagi pemerintah dan masyarakat Kota Makassar, memang kebijakan ini dilakukan hak-hak publik yang harus dilindungi oleh negara. Kemudian kebijakan seharusnya dievaluasi segera, karena periode kebijakan akan melebihi periode pembuat keputusan.

Kata kunci: *Kebijakan Publik, Kepentingan Umum, Otoritas-Kapitalis Urusan, Perampokan Hak Publik, Pegangan Kapitalis.*

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengharuskan setiap kota untuk menyediakan ruang publik (*public space*) yang dapat diakses oleh

seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. *Public space* selain dapat berfungsi sebagai daerah resapan air dan kawasan terbuka hijau, juga diharapkan berfungsi sebagai sarana bagi setiap warga negara dalam melakukan berbagai aktifitas-aktifitas seperti berolah raga, bersantai dan lain sebagainya. Oleh karena itu *public space* bukan hanya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah dalam menetapkan kebijakan tata ruang wilayah khususnya di kota-kota besar, tetapi juga merupakan kebutuhan dasar bagi setiap masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah (UU No. 26 tahun 2007). Kota Makassar sebagai salah satu kota Metropolitan dengan visi menjadi kota Dunia (*the world city*) terus melakukan pembenahan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang dapat mendukung tercapainya visi tersebut.

Lapangan Karebosi sebagai salah satu ikon kota Makassar yang berfungsi sebagai *public space* yang tentu saja statusnya sebagai milik publik (*public goods*) karena memang secara historis lapangan karebosi Makassar itu merupakan Alun-Alun Kerajaan Gowa – Tallo, bahkan merupakan salah satu situs sejarah setelah Balla’ Lompoe (Istana Raja) dan Tala’ Salapang (9 Pohon Lontar), karena di tengah-tengah lapangan karebosi itu terdapat Kuburan *pitua* (7 kuburan keramat) yang dipercayai oleh para tokoh masyarakat dan turunan kerajaan Gowa – Tallo. Lapangan Karebosi merupakan pusat aktifitas warga Makassar seperti berolah raga dan bersantai, sehingga mendapatkan perhatian pemerintah kota Makassar untuk ditingkatkan kualitasnya sebagai *public space* agar masyarakat yang melakukan aktifitas di areal ini semakin merasa nyaman.

Pada tahun 2006 pemerintah kota Makassar membuat kebijakan Revitalisasi lapangan karebosi dengan melibatkan investor swasta. Kebijakan ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar dan sekitarnya, status lapangan Karebosi pun berubah total, dulunya merupakan milik publik (*public goods*) sepenuhnya, sekarang sebagian besar (60 % *public space* : 40 % wilayah pengembangan bisnis PT. Tosan; sumber data, fajar on-line, 9 April 2010)

itupun yang 60 % masih dipasang pagar pembatsa sehingga masyarakat kota Makassar tidak lagi bebasa mengakses *public space* tersebut seperti sebelum direvitalisasi, sehingga dapat dikatakan bahwa status lapangan karebosi tersebut telah menjadi *private goods*. Pro – kontra terhadap kebijakan ini bukan karena revitalisasi itu, tetapi karena kebijakan itu telah merubah status lapangan karebosi menjadi *private goods*, karena sebuah skenario besar yang melibatkan negara (kekuasaan) di satu sisi dan pengusaha (kapitalisme) di sisi yang dengan satu legitimasi yakni tuntutan *Globalisasi* ((de le Dehesa, 2006).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka paper singkat ini mencoba membahas beberapa hal; apakah kebijakan revitalisasi itu kebijakan publik atau kebijakan bisnis? Kenapa kebijakan revitalisasi itu harus dilakukan dengan cara membangun persekongkolan antara penguasa dan pengusaha (Negara – Kapitalis)? Siapa aktor yang bersebunyi di balik di balik persekongkolan itu atas nama kebijakan publik? Dan yang paling penting adalah bahwa kebijakan itu menguntungkan siapa dan untuk kepentingan siapa, sehingga kebijakan revitalisasi itu melibatkan pihak swasta?

METODE

Penulis mencoba mengeksplor berbagai permasalahan yang diajukan dalam paper ini sengan menggunakan *Sensitivity analysis*, sebagai salah satu alat analisis kebijakan publik yang melihat proses pembangunan model yang didasarkan pada sistem dan dinamika perilaku aktor pengambil kebijakan.

Sensitivity analysis is an important tool in the model building process. By showin that the system does not react greatly to a change in a parameter value, it reduces the modeler's uncertainty in the behavior. In addition, it gives an opportunity for a better understanding of the dynamic behavior of the system. The use of sensitivity analysis in such policy analysis will be explored in a later

paper in this series. (Breierova and Choudhari, 2001; p.66).

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Seterusnya disandingkan dan dibandingkan dengan teori atau *adjustment* para ahli. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif sebagai konsekuensi dari penggunaan pendekatan kualitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kapitalisme sebenarnya telah ada sejak abad ke 16 yang kemudian diperkenalkan secara ilmiah oleh Adam Smith pada tahun 1776 yang berdasar pada individualisme, dimana setiap individu akan selalu berusaha untuk mengejar dan mencari keuntungan materi sehingga dapat memperoleh keuntungan ekonomi dan sosial dalam komunitasnya. Maka dalam sistem kapitalisme, hak kepemilikan individu memperoleh tempat yang sangat istimewa dan harus dilindungi oleh negara. (Harvey, 2005; Lippit, 2005).

Perkembangan kapitalisme di seluruh dunia bergerak sangat cepat, bahkan sudah menjadi sebuah sistem dunia (Wallerstein) yang memiliki karakteristik seperti yang dikemukakan oleh Wallerstein bahwa the world system as a set of mechanisms which redistributes resources from the *periphery* to the *core*. In his terminology, the *core* is the developed, industrialized part of the world, and the *periphery* is the "underdeveloped", typically raw materials-exporting, poor part of the world; the *market* being the means by which the *core* exploits the *periphery*.

Kapitalisme merupakan sebuah sistem dunia, maka Lippit (2005, 5) mengklasifikasi kapitalisme sebagai sistem dunia itu kedalam tiga tipe dengan mengatakan bahwa:

In the contemporary world, we can distinguish three primary types of models of capitalism. First, there is the Anglo-American type, a form of capitalism that emphasizes the role of markets and consequently tends to be extremely harsh in terms of its consequences for human welfare.

Second, there is the continental European type of capitalism, with its emphasis on the welfare state and social democracy. Third, there is the East Asian model of state-led capitalism, exemplified especially by the form capitalism has assumed in Japan and South Korea (Lippit, 2005; 5)

Interaksi ketiga model kapitalisme dalam sebuah sistem dunia tersebut dilakukan dengan membangun dan mendorong sebuah institusi baru yang disebut Globalisasi (Lippit, 2005; de le Dehesa, 2006). Globalisasi merupakan suatu proses liberalisasi yang dinamis, keterbukaan, dan hubungan internasional yang terbangun diatas institusi "pasar" yang sehat dan kompetitif (de le Dehesa, 2006), oleh Lippit (2005) disebut sebagai sebuah fenomena ekonomi yang menumbuhkan aktivitas ekonomi internasional melalui penelitian dan pengembangan produksi dan distribusi. Dengan demikian maka globalisasi merupakan boster atau penyedia tenaga yang sangat dahsyat bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berdasarkan pada kapitalisme – neoliberalisme itu (Solichin A. Wahab, 2010).

Sebagai sebuah boster yang terbangun diatas pasar yang bebas (liberalisasi), maka globalisasi membawa slogan perdagangan bebas (*freedom to trade*) dengan mendorong lahirnya perusahaan multinasional yang merupakan hasil akuisisi dan merger dari beberapa perusahaan lokal untuk bermain di pasar bebas (Norbäck and Persson, 2008). Perusahaan multinasional inilah yang berfungsi sebagai penyangga kapitalisme dunia dan memperoleh keuntungan yang lebih besar karena selalu memenangkan persaingan yang sehat dalam institusi pasar itu. (Harvey, 2005; Lippit, 2005; de le Dehesa, 2006), walaupun pasar itu sendiri sering tidak fair karena persaingan antara perusahaan nasional dan multinasional jelas terjadi ketidak seimbangan kekuatan terutama kekuatan kapital dalam memainkan peran dalam persaingan di pasar bebas itu.

Neoliberalisme merupakan teori pertama dalam praktek ekonomi politik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan

manusia yang didorong oleh kemerdekaan berusaha bagi setiap individu secara liberal dan keterampilan yang disertai kerangka kerja institusional yang memiliki karakteristik dimana hak kepemilikan pribadi yang kuat, pasar bebas, dan perdagangan bebas. Peran negara adalah memelihara dan menjamin kebebasan dan kemerdekaan pribadi itu dalam kerangka pasar dan perdagangan bebas, seperti menjaga kualitas dan integritas nilai uang. Negara juga harus meningkatkan kemampuan militer, pertahanan, kepolisian, dan struktur dan fungsi – fungsi peradilan untuk menjamin keamanan hak-hak kepemilikan itu, oleh kekuatan diluar pasar jika dibutuhkan demi berfungsinya kepemilikan pribadi itu pada mekanisme pasar (Harvey, 2005).

Keterkaitan secara teoritis antara kapitalisme, neoliberalisme, globalisasi dan peran negara diarahkan kepada terbentuknya sebuah institusi ekonomi baru yang mengarah kepada terbentuknya perilaku *homo economicus* (Nurmi (2006) yang merupakan buah dari sistem kapitalisme dunia (Lippit, 2003, p. 3 – 5). Lippit yakin bahwa kapitalisme sebagai sebuah sistem dunia memiliki dua sisi yang sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif kapitalisme adalah memperbaiki standar hidup dimana kapitalisme telah membuat kemungkinan untuk memberikan porsi yang lebih besar bagi penduduk yang ada di bumi. Sedangkan sisi negatifnya adalah menghasilkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan sosial kepada terbentuknya budaya komersial. Yang terpenting, bagaimanapun kontradiksi lingkungan, yang dapat membuat kekacauan yang serius dalam kehidupan manusia di bumi dan dalam kasus yang ekstrim yang dapat berlangsung lama yang perlu mendapatkan perhatian.

Victor D. Lippit (2005, 71-72) Globalisasi dan perubahan teknologi merupakan elemen inti dari kapitalisme. Sebagai sebuah fenomena ekonomi, maka globalisasi mengembangkan aktifitas ekonomi internasional termasuk masalah produksi dan distribusi, sehingga berbagai konotasi negatif termasuk perdagangan bebas/pasar bebas yang merupakan wujud dari neoliberalisme yang melahirkan

imperealisme ekonomi oleh negara-negara kaya seperti AS, Inggris, Jerman, China dan perusahaan-perusahaan kapitalisme internasional.

Terciptanya pasar yang bebas dan kondusif, berkurangnya peran pemerintah dalam aktifitas ekonomi dan tercapainya efisiensi pada sektor publik merupakan prasyarat yang harus dipenuhi untuk memuluskan jalannya kapitalisme, neoliberalisme dan globalisasi itu. Prasyarat ini disebut oleh Killick (1998) sebagai *conditionality*, yang menjadi kekuatan bagi pemerintah khususnya di negara-negara berkembang untuk memperoleh bantuan dari kelompok negara donor yang tergabung dalam kelompok kapitalisme dunia seperti World bank, IMF, CGI. IFI ADB dan lain sebagainya. Hal ini dipandang oleh Ghosh and Halil M. Guv (2006) bahwa globalisasi itu (liberalisasi ekonomi) dapat mengurangi kesenjangan pendapatan bagi masyarakat, tetapi pada kenyataannya berbagai studi menunjukkan justru globalisasi telah membuat kesenjangan pendapatan semakin menganga lebar. Dalam bahasa Ghosh and Guv (2006) dikatakan bahwa *Globalization has infact increased income inequalities*. Untuk menghindari dampak negatif dari globalisasi ini, Ghosh and Guv (2006) menyarankan adanya kombinasi (mixed) ekonomi makro antara sektor privat dengan perencanaan pemerintah yang didasarkan atas demokratisasi pada pengelolaan pasar dengan intervensi pemerintah (*state*), yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya *market failure*.

Koalisi antara sektor publik (*state/government*) dengan privat tersebut merupakan sebuah bentuk dari teori permainan Nurmi (2006). Ada beberapa teori permainan yang kita kenal, yakni *zero sum-game*, *constant sum-game* (Nurmi, 2006; hal. 60) dan *dominance-solvable* (Nurmi, 2006; hal. 62).

Lebih umum, solusi yang ditawarkan teori permainan bisa dipahami sebagai prediksi mengenai apa yang akan terjadi dalam permainan yang menganggap bahwa para pemain dalam kondisi rasional. Dalam beberapa permainan, para pemain memiliki strategi dominan. Solusinya kemudian

ditemukan pada persimpangan strategi-strategi tersebut.

Pada permainan yang melibatkan dua orang misalnya, solusi yang ditawarkan adalah *Nash equilibrium* (Nurmi, 2006; hal. 65), lainnya adalah *subgame perfect equilibrium* (Nurmi, 2006; hal. 73) yang memberikan penyelesaian masalah yang lebih baik sehubungan dengan beberapa masalah khusus yang tidak bisa diselesaikan oleh *Nash equilibrium* seperti pilihan-pilihan yang tidak rasional, bentuk representasi permainan yang luas.

Proses bargaining antara pemerintah dan swasta dalam menyediakan layanan publik memang dimungkinkan baik dalam bentuk desain kelembagaan maupun pilihan strategi (Hood and Lodge. 2006). Jadi peran pemerintah tidak lepas sama sekali dari kelembagaan dan pilihan strategi pelayanan publik yang terbangun dari kerjasama antara sektor publik dan privat itu. Hubungan antara kapitalisme dalam institusi publik dan privat kemudian membentuk sistem ekonomi setiap negara dengan model yang berbeda-beda. Di Korea Utara misalnya dikenal dengan tiga model ekonomi, yaitu ekonomi pemerintah, militer dan privat (Lee and Yoon, 2004).

PEMBAHASAN

Kebijakan revitalisasi lapangan Karebosi Makassar dapat dikaji dengan menggunakan teori-teori yang telah diuraikan diatas. Masalah yang diajukan dalam pendahuluan adalah apakah kebijakan revitalisasi itu kebijakan publik atau kebijakan bisnis? Kenapa kebijakan revitalisasi itu harus dilakukan dengan cara membangun persekongkolan antara penguasa dan pengusaha (Negara – Kapitalis)? Siapa aktor yang bersebeny di balik di balik persekongkolan itu atas nama kebijakan publik? Dan yang paling penting adalah bahwa kebijakan itu menguntungkan siapa dan untuk kepentingan siapa, sehingga kebijakan revitalisasi itu melibatkan pihak swasta?

Beralihnya status Lapangan Karebosi Makassar (dari *public goods* sebelum direvitalisasi menjadi *private goods* setelah direvitalisasi) jelas merupakan bentuk perselingkuhan antara penguasa dan

pengusaha sebagai bentuk dominasi kapitalis terhadap peminggiran peran pemerintah dalam penyediaan *public space* sekaligus perampasan hak-hak dan kepentingan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Pelibatan swasta dalam kebijakan revitasiasi ini memperlihatkan peran pemerintah kota Makassar dalam memberikan fasilitas dalam bentuk pengalihan status tersebut yang menjadi prasyarat atau *conditionality* Killick (1998), atau mungkin sebagai bentuk kebijakan ekonomi makro yang “mixed” antara sektor privat dengan perencanaan pemerintah yang didasarkan atas demokratisasi pada pengelolaan pasar dengan intervensi pemerintah Ghosh and Guv (2006).

Semakin mengecilnya peran pemerintah dan terjaminnya hak-hak privat dan individu terhadap penguasaan sumber-sumber daya merupakan lahan subur bagi tumbuh dan berkembangnya kapitalisme dan neoliberalisme dalam konteks globalisasi ((Harvey,2005; Lippit, 2005; dan de le Dehesa, 2006). Kebijakan pemerintah semakin sulit menunjukkan warnanya, pemerintah tidak lagi dapat membedakan yang mana kebijakan publik dan yang mana kebijakan bisnis, itulah neoliberalisme (Solichin A. Wahab, 2010). Sama halnya dengan kebijakan revitalisasi lapangan karebosi tersebut kebijakan bisnis karena yang memperoleh keuntungan lebih besar adalah kapitalis (perbankan Asing dan PT. Tosan Lestari).

Hasil penelusuran penulis dari tahun 2006 – 2008 diperoleh data bahwa total investasi yang digunakan untuk merevitalisasi lapangan Karebosi 80 % berasal dari pinjaman dan fasilitas kredit perbankan. Berdasarkan data dari PT. Tosan Lestari sebagai pengembang pada tahun 2007 bahwa bank-bank yang memberikan fasilitas kredit adalah Bank International Indonesia (BII) dan Bank Central Asia (BCA) dan sebagian bank Mandiri dengan menggunakan Hak Guna Lahan dan Hak Guna Usaha atas Lapangan karebosi sebagai agunan atau jaminan. Maka dari segi investasi, sebenarnya pihak PT. Tosan ini tidak mengeluarkan investasi yang besar untuk melakukan revitalisasi atas lapangan

Karebosi, karena semuanya dibiayai dari kredit perbankan.

Kebijakan revitalisasi ini merupakan bentuk koalisi kalau tidak mau dikatakan sebagai perselingkuhan antara pemerintah dengan kelompok kapitalis. Dalam dunia kapitalis ini adalah hal yang wajar dan normal, ketika salah satu dari dua individu atau kelompok yang hanya menguasai satu bentuk kapital saja maka jalan keluarnya adalah koalisi (Nurmi, 2006; Solichin A. Wahab, 2010). Secara khusus, koalisis yang dibangun oleh dua individu atau kelompok yang tidak mampu menyelesaikan masalah yang spesifik disebut sebagai koalisi model *subgame perfect equilibrium* (Nurmi, 2006).

Dari sisi pertumbuhan pembangunan, kebijakan revitalisasi ini telah memperlihatkan hasil yang cemerlang, wajah karebosi telah berubah sedara drastis dan dramatisir, kehadiran mall besar dengan berbagai produk infor jelas memperlihatkan adanya dominasi kapitalisme global, tersingkirnya para pedagang kaki lima (menurut hasil observasi penulis tahun 2006 berjumlah 50 orang) tidak satupun diantara mereka dapat memperoleh tempat untuk melanjutkan usahanya di dalam mall tersebut dengan alasan tidak bisa berkompetisi (Fajar, 9 November 2008). Ini merupakan bukti bahwa kapitalisme dan neoliberalisme yang dibungkus oleh globalisasi telah membuat kesenjangan pendapatan (Ghosh and Guv, 2006; Norbäck and Persson, 2008).

Dalam kaitannya dengan status Lapangan Karebosi sebagai barang publik (*public goods*), maka representasi terpilih, dalam hal ini pemerintah, merupakan jawaban bagaimana kemunculan dan kelaziman mekanisme pembuatan keputusan politik dalam mengurangi dan mereduksi eksternalitas (konsekuensi kegiatan ekonomi yang mempengaruhi pihak lain tanpa diterapkan melalui harga pasar) yang terkait dengan produksi, konsumsi, dan kegiatan lainnya (Nurmi, 2006; p. 165), meskipun terkadang, eksternalitas itu muncul dari pemerintah sendiri.

Sebenarnya kebijakan revitalisasi lapangan Karebosi Makassar merupakan bentuk implementasi paradigma *new public*

management dalam penyediaan layanan publik oleh pihak swasta. Tetapi yang menjadi sorotan disini adalah bahwa pemerintah dan masyarakat kota Makassar tidak memperoleh keuntungan apa-apa dari kebijakan revitalisasi ini, keuntungan yang diperoleh pemerintah Kota Makassar secara resmi selama 30 tahun masa kotrak kurang lebih 5 Milyar rupiah (Fajar, senin, 10 November 2008). Sedangkan masyarakat tidak lagi dapat mengakses *public space* itu sebagaimana sebelumnya. Demikian halnya dengan pemerintah kota Makassar, tidak lagi terlibat dalam pengelolaan lapangan Karebosi ini setelah direvitalisasi.

Jadi jelas terlihat bahwa kebijakan revitalisasi ini bukan kebijakan publik tetapi merupakan kebijakan bisnis, karena tidak memberikan keuntungan secara signifikan kepada pemerintah kota dan masyarakat Makassar. Suatu hal yang sangat fantastis, areal seluas 11 hektar yang diserahkan kepada pihak swasta untuk dikelola dengan kepentingan bisnis yang tentu saja keuntungannya jelas sangat besar, pemerintah dan masyarakat tidak memperoleh apa-apa yang sesungguhnya merupakan hak-hak mereka. Justru yang terjadi adalah perampasan hak-hak publik demi memenuhi permintaan dan kepentingan kapitalist.

Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai gerakan demonstrasi dari berbagai kalangan masyarakat dan LSM seperti pada tanggal 3 November 2007, tetapi pada hari berikutnya meuncul demo tandingan yang dilakukan oleh massa yang pro revitalisasi dan domotori oleh pemuda Panca Marga yang merupakan pendukung aktor pengambil kebijakan tersebut. Dalam peristiwa ini terjadi situasi yang sangat kritis yang hampir menimbulkan bentrok fisik antara massa yang pro dan yang kotra terhadap kebijakan revitalisasi itu.

Selain menguntungkan kapitalist, kebijakan revitalisasi karebosi jelas menguntungkan elit yang bertindak sebagai aktor dari kebijakan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan masuknya salah satu elit PT. Tosan sebagai salah seorang tim sukses aktor kebijakan tersebut dalam melanjutkan kekuasaan sebagai Wali Kota Makassar periode kedua yaitu (2008 – 2013) dan

sekaligus sebagai donatur dalam kegiatan kampanye pemilihan langsung wali kota Makassar tersebut. Ini adalah bentuk perselingkuhan yang nyata antara negara (penguasa) dengan kapitalist (pengusaha). inilah wajah kapitalisme, neoliberalisme dan globalisasi yang menyingkirkan peran negara dalam menyediakan layanan publik. Akibatnya adalah kesenjangan pendapatan, penyingkiran kaum marginal termasuk produksi dan distribusi barang-barang lokal serta konflik ketenagakerjaan.

Berbagai alasan teoritis yang sering digunakan oleh kelompok yang mendukung kebijakan revitalisasi tersebut bahwa pemerintah kota Makassar tidak memiliki kemampuan untuk mendanai revitalisasi Karebosi itu, sehingga diperlukan kerjasama (partnership) antara pemerintah dan swasta. Alasan lainnya adalah mewujudkan kota Makassar sebagai *the world city* di era Globalisasi maka pelibatan sektor privat dalam menyediakan layanan publik semakin dibutuhkan yang sering disebut dengan istilah privatisasi (Lipit, 2005) yang disebut oleh Killik (1998) sebagai *conditionality*. Akibat negatif yang ditimbulkan dari kebijakan revitalisasi ini adalah tidak terdapatnya public space yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktifitas seperti berolah raga, sehingga semakin banyak anak-anak yang bermain di jalanan yang nyata-nyata mengganggu kepentingan umum.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa kebijakan revitalisasi Lapangan Karebosi Kota Makassar lebih besar orientasi kepada kebijakan bisnis daripada kebijakan publiknya. Karena kebijakan ini lebih banyak menguntungkan sektor bisnis (*private*) daripada menguntungkan masyarakat. Bahkan kebijakan ini telah menggambarkan adanya perselingkuhan antara negara (penguasa) dengan privat (pengusaha) yang secara langsung maupun tidak langsung merampas hak-hak publik. Kebijakan ini menggambarkan kuatnya cengkeraman kapitalist dalam mempengaruhi kebijakan publik yang diambil oleh para pengambil keputusan

dalam institusi pemerintah (negara), padahal tugas utama negara (pemerintah) adalah menyediakan layanan publik bagi seluruh warga negara termasuk memelihara hak-hak publik itu dalam bentuk apapun.

Kebijakan revitalisasi lapangan Karebosi Makassar terbukti tidak memberikan keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat kota Makassar paling tidak dalam kurung waktu selama 30 tahun kedepan. Maka seharusnya kebijakan tersebut segera dievaluasi, karena umur kebijakan ini jelas akan melampaui umur masa jabatan pengambil kebijakannya. Dengan demikian jelas, jika di kemudian hari ternyata kebijakan ini salah dan merugikan pemerintah dan masyarakat kota Makassar jelas siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban.

DAFTAR RUJUKAN

- Ghosh, B.N and Halil M. Guven. 2006. *Globalization And The Third World : A Study Of Negative Consequences*. Palgrave Macmillan. Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS And 175 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10010 Companies And Representatives Throughout The World.
- Harvey, David. 2005. *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford University Press. New York.
- Killick, Tony. 1998. *Aid And The Political Economy Of Policy Change*. Overseas Development Institute, London
- Lippit, Victor D. 2005. *Capitalism*. Routledge, 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN Simultaneously published in the USA and Canada.
- de le Dehesa, Guillermo. 2006. *Winner and Losers in Globalization*. Blackwell Publishing Ltd. USA.
- Nurmi, Hannu. 2006. *Models of Political Economy*. Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN. Simultaneously published in the USA and Canada. 270 Madison Ave, New York, NY 10016.
- Hood, Christopher and Martin Lodge. 2006. *The Politics of Public Service Bargains: Reward, Competency,*

- Loyalty—and Blame.* Oxford University Press Inc., New York.
- Lee , Young-Sun and Deok Ryong Yoon. 2004. *The Structure of North Korea's Political Economy: Changes and Effects.* Korea Institute for International Economic Policy (KIEP). Korea.
- Norbäck , Pehr-Johan and Lars Persson, 2008. *Globalization and profitability of cross-border mergers and acquisitions.* Research Article *Economic Theory* 35: 241–266, 2008.
- Breierova and Choudhari, 2001. *An Introduction to Sensitivity Analysis.* The Massachusetts Institute of Technology, Permission granted to distribute for non-commercial educational purposes.